

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Bidang ekonomi merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan hidup suatu negara. Setiap negara melakukan berbagai upaya yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negaranya. Keberhasilan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi dituntut untuk menciptakan suasana persaingan yang sehat di berbagai bidanusaha. Tugas dan fungsi pemerintah untuk mengatur kegiatan usaha tersebut salah satunya melalui penerbitan izin usaha perdagangan bagi pihak swasta, yang didukung birokrasi usahayang cepat, tidak berbelit-belit dan berdaya guna.

Dinas Perdagangan merupakan bagian penting dari pemerintahan yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor perdagangan di negara ini. Dinas ini bertindak sebagai pengawas dan regulator dalam aktivitas perdagangan, memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal izin usaha, standar kualitas produk, dan peraturan harga. Selain itu, Dinas Perdagangan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen dengan mengawasi praktik bisnis yang merugikan konsumen serta memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa.

Kota Padang merupakan pusat ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya aktivitas perdagangan di kota ini menjadi alasan penting untuk memiliki sebuah dinas yang secara khusus mengelola sektor perdagangan. sebagai pusat perdagangan regional kota padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan lokasi strategis di sepanjang pesisir Barat Sumatera, telah lama menjadi pusat perdagangan regional. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleksitas pasar lokal mendorong kebutuhan akan lembaga pemerintah yang fokus pada pengawasan, regulasi, dan pengembangan sektor perdagangan.

Dalam konteks ekonomi dan perdagangan, distribusi merupakan salah satu aspek krusial yang menentukan efektivitas rantai pasok dan ketersediaan barang di pasar. Distribusi adalah proses penyebaran produk dari produsen kepada konsumen melalui berbagai saluran yang ada. Efektivitas distribusi sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang memadai, yang mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, gudang, dan transportasi, serta sistem informasi dan komunikasi yang mendukung. Oleh karena itu, implementasi sarana prasarana yang tepat adalah kunci untuk memastikan kelancaran aliran barang dan meminimalkan biaya logistik.

Distribusi merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen rantai pasok yang memastikan produk dari produsen sampai ke konsumen dengan efisien dan tepat waktu. Distribusi mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga pengelolaan informasi terkait aliran barang. Efektivitas distribusi sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang

tersedia, yang meliputi infrastruktur fisik seperti jalan, gudang, dan alat transportasi, serta infrastruktur non-fisik seperti teknologi informasi dan sistem komunikasi. Sarana dan prasarana yang memadai dapat mengurangi biaya distribusi, mempercepat waktu pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Pengertian sarana dan prasarana dalam konteks distribusi barang sangat luas. Sarana merujuk pada fasilitas dan alat yang digunakan secara langsung dalam proses distribusi, seperti truk pengangkut, kontainer, gudang, dan alat komunikasi. Prasarana, di sisi lain, mencakup infrastruktur pendukung yang memungkinkan berfungsinya sarana tersebut, seperti jalan raya, pelabuhan, jaringan listrik, dan sistem informasi logistik. Keduanya memainkan peran penting dalam memastikan barang dapat bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan efisien dalam memastikan barang dapat bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan efisien dan aman.

Moenir (2006, dikutip dari Kiki Armansyah 2018) mendefinisikan sarana sebagai benda yang memiliki fungsi utama untuk mencapai tujuan seperti toilet, tempat tidur, dan lain- lain, sedangkan prasarana merupakan alat penunjang atau secara tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan seperti lingkungan sekitar. Kotler (2003:183) Saluran distribusi yaitu melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen.

Dinas Perdagangan Kota Padang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengoptimalkan distribusi barang di wilayahnya. Sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada sektor perdagangan, Dinas Perdagangan

bertugas untuk memastikan bahwa proses distribusi barang berjalan lancar dan efisien. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui implementasi sarana dan prasarana yang memadai. Implementasi ini mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung aktivitas distribusi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Perdagangan Kota Padang telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana distribusi. Upaya ini meliputi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, modernisasi fasilitas gudang, serta penerapan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola aliran barang. Implementasi teknologi informasi, misalnya, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap pergerakan barang, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran yang seringkali menghambat pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Selain itu, kondisi geografis Kota Padang yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan gempa bumi juga menambah kompleksitas dalam merancang dan membangun infrastruktur distribusi yang tahan lama dan handal.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas tentang “Implementasi Sarana Prasarana Dalam Aktivitas Di Dinas Perdagangan Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian kali ini mengenai Bagaimana Implementasi Sarana Prasarana dalam Aktivitas Distribusi di Dinas Perdagangan Kota Padang

1.3 Tujuan

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Sarana Prasarana dalam Aktivitas Distribusi di Dinas Perdagangan Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan magang ini merupakan salah satu proses untuk mempelajari praktek-praktekpekerjaan yang nyata pada perusahaan sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Hasil laporan magang ini dapat memberikan timbal balik kepada perusahaan berupa evaluasi atas penerapan Komunikasi pemasaran terpadu selama ini. Penelitian ini akan memberikan masukan berupa langkah kebijakan apa yang sebaiknya ditempuh oleh Dinas Perdagangan Kota Padang

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan tambahan untuk pengetahuan, wawasan, dan informasi terkait dengan implementasi sarana prasarana dalam aktivitas distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi dan untuk menambahkan pengetahuan dan mengkaji masalah- masalah yang terkait dengan Implementasi Sarana Prasarana dalam Aktivitas Distribusi di Dinas Perdagangan Kota Padang

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penyusunan tugas akhir, untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan judul pembahasan penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Riset Pustaka

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca dan mengumpulkan riset yang berkaitan dengan Implementasi Sarana Prasarana dalam Aktivitas Distribusi di Dinas Perdagangan Kota Padang

2. Penelitian lapangan

Proses penelitian lapangan dilakukan dengan dua metode yaitu:

a. Metode Observasi

Menurut Echdar (2017), observasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Penulis terlibat langsung dalam melakukan kegiatan observasi yang dimana penulis melaksanakan magang pada divisi Sarana dan pelaku distribusi di Dinas Perdagangan Kota Padang selama 44 hari kerja. Proses observasi dilakukan dengan mengamati proses kegiatan Implementasi Sarana Prasarana dalam Aktivitas Distribusi di Dinas Perdagangan Kota Padang yang dilakukan di perusahaan tersebut.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan dalam melakukan pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya (Echdar, 2017). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara personal dengan kepala bidang sarana dan pelaku distribusi pada Dinas Perdagangan Kota Padang

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, dan manfaat magang, serta sistematika penulisan pada magang ini.

BAB II Merupakan bab landasan teori yang menerangkan penjabaran dari teori-teori yang berkaitan dengan variable topik dan hal yang mendasari magang, serta kerangka pemikiran teoritis pada magang ini.

BAB III Merupakan bab gambaran umum perusahaan, yang berisikan tentang profil tempat magang yaitu Dinas Perdagangan Kota Padang, serta pembahasan tentang sejarah, visi dan misi perusahaan.

BAB IV Merupakan bab pembahasan yang berisikan laporan hasil kegiatan selama magang dan juga mengenai bagaimana implementasi sarana prasarana dalam aktivitas distribusi di Dinas Perdagangan Kota Padang

BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari kegiatan magang yang telah dilakukan, serta saran yang baik diberikan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang sehingga bisa bermanfaat bagi kepentingan pihak perusahaan.

1.7 Tempat dan waktu Magang

Alamat : JL. Khatib Sulaiman 67, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara,

Kota Padang, Sumatera Barat,

Website : <https://disdag.padang.go.id/>

Provinsi : Sumatra Barat

Waktu Pelaksanaan : 29 Januari–05 April 2024/44 hari kerja

1.8 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam kegiatan magang ini terfokus pada bagaimana Implementasi Sarana Prasarana dalam Aktivitas Distribusi di Dinas Perdagangan Kota Padang

